MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bldk.mahkamahagung.go.id, puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 435/BLD.2/ST.KP7.1/VII/2024

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Audiensi dan Wawancara Penyusunan Naskah Urgensi ”Penyeragaman Nomenklatur Nama Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya” Tahun Anggaran 2024.

Dasar :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
2. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61/BLD.2/SK.HK1.2.5/V/2024 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Naskah Urgensi Penyeragaman Nomenklatur Nama Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya tanggal 08 Mei 2024.

M E N U G A S K A N :

Kepada :

No.	Nama/NIP/Golongan	Jabatan
1.	Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. 198606062009041003 – III/d	Hakim Yustisial Kamar Agama pada Kepaniteraan MA RI
2.	Agus Abdur Rahman, S.H., M.H. 198208022009041002 – III/d	Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI
3.	Budi Setioko, S.H., M.H. 197509022001121003 - IV/b	Kepala Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI
4.	Hj. Lystia Paramita Amaliayah Rum, S.H., M.H. 198406202008052001 – IV/a	Kepala Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
5.	Novie Kurniawan Witianto, S.H., M.H. 197911092011011001 – IV/a	Kepala Sub Bidang Program Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6.	Dhika Hafizh Pratama, S.Sos. 198512112011011009 – III/d	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi MA RI
7.	Osmadera Pramisianti, A.Md.A.B. 199809052022032011 – II/c	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi MA RI
8.	Ronizam Binarda Yusuf, S.M.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI

Untuk : Melakukan perjalanan dinas dalam negeri ke Kantor Pengadilan di Wilayah Hukum Bali dalam rangka melaksanakan kegiatan Audiensi dan Wawancara Penyusunan Naskah Urgensi ”Penyeragaman Nomenklatur Nama Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya” pada tanggal 06 s.d 09 Agustus 2024.

Segala biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 Nomor : 005.06.1.610378/2024 tanggal 28 November 2023.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Juli 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan

Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H.
NIP. 197011141994031004

Tembusan :
1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI;
4. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI;
5. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI;
6. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi MA RI;
8. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.